

**DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP
KETANGGUHAN MASYARAKAT MENJALANI KETENTUAN
PENANGANAN WABAH COVID-19 STUDI DI DESA LOKORY
KECAMATAN TANARIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT**

Chevin Nara Haba¹,

¹ Program Magister Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Korespondensi penulis : cnarahaba@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has not only had an impact on health, but also on social and economic conditions. Therefore, to avoid some of these things, the government revised the regulation. One of the revised regulations is Permendagri Number 69 of 2018. The purpose of this research is to examine the impact of the BLT program on community resilience in carrying out the provisions for handling the COVID-19 outbreak in Lokory Village, Tanarighu District, West Sumba Regency. The research method used is a qualitative research method which is often referred to as a naturalistic research method because the research is carried out to examine a natural place (natural setting). And in this study, the results of the government's collaboration in facing the realization of a resilient community facing the COVID-19 pandemic in Lokory Village, Tanarighu District, West Sumba Regency through the Government Cooperation scheme, with direct cash assistance there are still people whose needs have not been met, meaning that they are not strong, then the form of government cooperation namely by involving bringing new innovations in the form of selling businesses online so that every community who sells their wares can be online and can be delivered directly to the buyer's place and comply with health protocols and with the marketplace application we can connect sellers with buyers. The supporting factor is the government's transparency to the public. supporters of the village government have always been transparent with us as the village government, the obstacles that occur in the BLT Program Against Community Resilience In Lokory, Tanarighu District, West Sumba Regency, so far no action has been taken. at all regarding the resolution of obstacles that occur Efforts to create a community that is resilient to the COVID-19 pandemic in Lokory Village seen from the principle of good governance, namely the level of community participation is very high, and is carried out in accordance with the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 54/Huk/2020 concerning the Implementation of Aid Social Food and Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), and in Services, the government is transparent and transparent to the public

Keywords: program implementation, community resilience, COVID 19

ABSTRACT

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi..Oleh karena itu, untuk menghindari beberapa hal tersebut, pemerintah merevisi peraturan tersebut.Salah satu peraturan yang direvisi adalah Permendagri Nomor 69 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak program BLT terhadap ketahanan masyarakat dalam menjalani ketentuan penanganan wabah COVID-19 di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat .Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan untuk mengkaji pada suatu tempat yang alamiah (natural setting). Dan dalam penelitian ini, hasil kerjasama pemerintah dalam menghadapi terwujudnya masyarakat tangguh menghadapi pandemi COVID-19 di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat melalui skema Kerjasama Pemerintah, dengan bantuan langsung tunai masih terdapat masyarakat yang kebutuhan belum terpenuhi artinya belum kuat, maka bentuk kerjasama pemerintah yaitu dengan melibatkan membawa inovasi-inovasi baru berupa jualan usaha secara online sehingga setiap masyarakat yang menjual dagangannya bisa online dan bisa diantar langsung ke tempat pembeli dan mematuhi protokol kesehatan dan dengan aplikasi marketplace kita bisa menghubungkan penjual dengan pembeli. Faktor pendukungnya adalah transparansi pemerintah kepada masyarakat.pendukung pemerintah desa selalu transparan dengan kami sebagai pemerintah desa, kendala yang terjadi pada Program BLT Terhadap Ketahanan Masyarakat Di Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat sejauh ini belum ada tindakan yang dilakukan. sama sekali mengenai penyelesaian kendala yang terjadi Upaya mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi pandemi covid-19 di Desa Lokory dilihat dari prinsip good governance yaitu tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, dan dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dan Dalam Pelayanan sudah merata dan pemerintah transparan kepada masyarakat.

Kata kunci: implementasi program, ketangguhan masyarakat, COVID 19

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan untuk menanggulangi pandemi covid-19 melalui PSSB hingga PPKM menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat. Menurut Wongkar, dkk., (2021) kebijakan pemerintah membatasi untuk melakukan kegiatan dengan cara: pekerja dirumahkan bahkan sampai di-PHK, para petani tidak dapat menjual hasil kebun karena berkurangnya pembeli, para sopir angkutan tidak ada lagi penumpang, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial kesenjangan pendapatan, hingga terjadinya disparitas wilayah. Oleh karena itu, untuk menghindari beberapa hal yang disebutkan, pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan. Salah satu peraturan yang direvisi adalah Permendagri Nomor 69 Tahun 2018.

Berbagai cara terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Mulai dari adanya satgas covid-19, pembatasan sosial berskala besar hingga pada pembatasan kegiatan masyarakat. Dampak adanya perubahan-perubahan ini membuat sebagian besar usaha mengalami penurunan pendapatan hingga pada penutupan usaha. Hal ini kemudian melahirkan pro-kontra penanganan covid-19. Meminimalisir berbagai tanggapan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam membantu masyarakat sehingga kebutuhan pangan sebagai pemenuhan nutrisi masyarakat segera dilakukan. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT).

Menanggulangi pandemi covid-19, pemerintah juga melakukan berbagai kampanye baik melalui video-video pendek hingga penertipan langsung oleh aparat pererintahan. Kampanye ini umumnya untuk menghimbau masyarakat agar sadar dalam menerapkan protokol kesehatan. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat penularan.) terbentuknya masyarakat desa yang tangguh akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko

bencana atau wabah. Sebelum adanya pandemi covid-19, masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Partisipasi masyarakat ini dilakukan karena masyarakat sadar bahwa kehadiran masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa. Partisipasi ini belum sepenuhnya menjadikan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Hal ini diartikan bahwa partisipasi masyarakat sendiri belum membentuk sikap siapsiaga terhadap bencana.

Masyarakat dikatakan tangguh terhadap pandemi covid-19 merupakan masyarakat dengan tingkat keamanan tinggi mampu merancang dan membangun dalam lingkungan yang memiliki resiko. Maarif (2013) menjelaskan bahwa masyarakat tangguh juga dapat dibentuk dengan memberikan pemahaman, hal tersebut akan membangkitkan ke siapsiagaan atau ketangguhan masyarakat. Pemahaman masyarakat dapat dijelaskan sebagai bentuk pengetahuan untuk mengantisipasi, dan meminimalisir melalui adaptasi dengan lingkungan setempat. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa ketangguhan masyarakat sangat

didukung oleh pengetahuan masyarakat melalui peningkatan kapasitas tentang manajemen wabah / bencana / pandemi, dan tingkat kerentanan masyarakat terhadap pandemi covid-19 (Husna, 2011; Oktari, 2019).

Penyebaran covid-19 terus meningkat dan memiliki dampak yang kompleks. Misalnya pada sektor perekonomian pandemi telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program bantuan langsung tunai yang ditujukan untuk masyarakat terdampak, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Bantuan langsung tunai diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan keluarga. Terpenuhinya kebutuhan yang berkecukupan di masa pandemi covid-19 dapat menjadikan masyarakat tangguh. Membentuk masyarakat yang tangguh memerlukan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kerja sama ini diharapkan mampu membentuk pengetahuan seperti sikap masyarakat terhadap resiko, cara

menghadapi keadaan darurat di lingkungan, dan sikap peduli terhadap pandemi. Hal ini akan menjadi menarik karena ketangguhan masyarakat menjadi kunci utama dalam penyebaran covid-19. Oleh karena itu, judul yang akan diteliti adalah Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketangguhan Masyarakat Menjalani Ketentuan Penanganan Wabah Covid-19 Studi Kasus Di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.

2.METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan untuk meneliti pada tempat yang alamiah (natural setting).Dimana dilakukan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam pengumpulan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. (Sugiyono, 2018:3). Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, jenis penelitian adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketangguhan Masyarakat Menjalani Ketentuan Penanganan Wabah Covid-19 Studi Kasus Di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat

(UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara. Tujuan pemberian Program Bantuan yaitu menjaga daya beli masyarakat pada saat pandemi Covid 19. Bantuan-bantuan tersebut akan didistribusikan

ke seluruh wilayah Indonesia, dan menysar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung. Menariknya, menyoal bantuan tunai BST dan BLT, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan adapun Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketangguhan Masyarakat Menjalani Ketentuan Penanganan Wabah Covid-19 Studi Di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa Dampak dari bantuan langsung tunai disaat pandemi covid masyarakat tetap tangguh karena kehidupan bisa dicukupi dengan uang BLT sebesar Rp.600.000 masyarakat tetap tangguh dalam hadapi penganggurann karena batasan jam usaha

Faktor Pendukung

Faktor pendukungnya yaitu transparannya pemerintah terhadap masyarakat faktor pendukung pemerintah desa selalu transparan dengan kami sebagai pemeritah desa, dan disitu mereka menyapaikan siapa

saja yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai didalam program program Bantuan Langsung Tunai

Faktor Penghambat

Desa Lokori masih banyak yang belum bersekolah karena berhubungan dengan pendidikan yang kurang akhirnya ketika adakan rapat dibalai desa tidak semua masyarakat pergi karena kurangnya pemahaman mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketangguhan Masyarakat Menjalani Ketentuan Penanganan Wabah Covid-19 . selanjutnya Sarana prasaran adalah bentuk fasilitas yang paling didalam proses berjalannya Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketangguhan Masyarakat Menjalani Ketentuan Penanganan Wabah Covid-19 Studi Kasus Di Desa Lokory, masyarakat Desa Lokori Faktor yang menjadi penghambat didalam pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketangguhan Masyarakat Menjalani Ketentuan Penanganan Wabah Covid-19 di Desa lokori yaitu fasilitas yang kurang memadai didalam pelayanan.

Cara Mengatasi Hambatan Program BLT Terhadap Ketangguhan Masyarakat Di Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat

Didalam hambatan pasti ada usaha pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi didalam Program BLT Terhadap Ketangguhan Masyarakat Di Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Lokori bahwa mengenai mengenai hambatan yang terjadi didalam Program BLT Terhadap Ketangguhan Masyarakat Di Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat sejauh ini belum ada tindakan sama sekali mengenai penyelesaian masalah hambatan yang terjadi di Desa Lokori

Upaya mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi pandemi covid-19 di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat melalui skema Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat (Governance)

1. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat

Didalam mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi pandemi covid-19 pentingnya kerja sama pemerintah swasta dan masyarakat karena dengan uang BLT masih ada masyarakat yang merasa belum tercukupi maka dari itu

masyarakat kerja sama pemerintah maupun swasta. bentuk kerjasama pemerintah didalam menghadapi mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi pandemi covid-19 di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat melalui skema Kerjasama pemerintah, swasta dengan adanya bantuan langsung tunai masih ada masyarakat yang memang kebutuhan belum tercukupi artinya belum tangguh maka bentuk kerjasama pemerintah yaitu dengan melibatkan pihak swasta dengan membawa inovasi baru berupa penjualan usaha secara daring jadi setiap masyarakat yang menjual dagangannya bisa secara online dan bisa diantar langsung ketempat pembeli serta mematuhi protokol kesehatan dan dengan adanya aplikasi marketplace dapat terhubung kami penjual dengan pembeli Akibat pembatasan sosial dimasyarakat yang hampir menghentikan kegiatan ekonomi konvensional, mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi ke sistem digital atau online, dan didukung dengan tersedianya pihak swasta pebisnis ecommerce yang menyediakan lapak secara gratis untuk masyarakat bisa berjualan online.

2. partisipasi

Partisipasi adalah sebagai salah satu prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. prinsip partisipasi terhadap masyarakat sudah baik, tidak ada masalah hingga saat ini. Tingkat dari partisipasi masyarakat di di desa Lokori Dua masyarakat ikut serta dalam kegiatan ataupun program-program, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan good governance yaitu masyarakat mengambil bagian dan ikut serta dalam penyelenggaraan good governance mengikuti kegiatan Balai Desa termasuk program bantuan langsung tunai di masyarakat selalu hadir ke balai desa untuk mengikuti rapat tentang program Bantuan Langsung Tunai dan kami pun ikut terlibat dalam rapat ataupun ada masalah konsultasi bersama agar kami pun ikut tau, dan kami juga memberi masukan terhadap program yang akan dijalankan dan

setiap pembangunan di sepakati secara bersama-sama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka kesimpulannya adalah

4.1. Kerja sama pemerintah didalam menghadapi mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi pandemi covid-19 di Desa Lokory Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat melalui skema Kerjasama pemerintah adanya bantuan langsung tunai masih ada masyarakat yang memang kebutuhan belum tercukupi artinya belum tangguh maka bentuk kerjasama pemerintah yaitu dengan melibatkan membawa inovasi baru berupa penjualan usaha secara daring jadi setiap masyarakat yang menjual dagangannya bisa secara online dan bisa diantar langsung ketempat pembeli serta mematuhi protokol kesehatan dan dengan adanya aplikasi marketplace dapat terhubung kami penjual dengan pembeli. Akibat pembatasan sosial dimasyarakat yang hampir menghentikan kegiatan ekonomi konvensional, mendorong

masyarakat untuk melakukan transaksi ke sistem digital atau online, dan didukung dengan tersedianya pihak swasta pebisnis ecommerce yang menyediakan lapak secara gratis untuk masyarakat bisa berjualan online.

2 Faktor pendukungnya yaitu transparannya pemerintah terhadap masyarakat faktor pendukung pemerintah desa selalu transparan dengan kami sebagai pemeritah desa, dan disitu mereka menyapaikan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai didalam program program Bantuan Langsung Tunai, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang sumber daya manusia dan sarana prasarana .Mengenai hambatan yang terjadi didalam Program BLT Terhadap Ketangguhan Masyarakat Di Lokory belum ada penyelesaiann

4. Upaya mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi pandemi covid-19 di Desa Lokory desa dilihat dari prinsip good governance yaitu kerjasama pemerintah yaitu dengan melibatkan pihak swasta dengan membawa inovasi baru berupa penjualan usaha secara daring jadi setiap masyarakat yang

menjual dagangannya bisa secara online dan bisa diantar langsung ketempat pembeli serta mematuhi protokol kesehatan dan dengan adanya aplikasi marketplace dapat terhubung kami penjual dengan pembeli.

4.2. Saran

1. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas yang dibutuh didalam pelayanan bantuan langsung tunai disaat pandemi covid di desa Lokori

2.Pemerintah harus cepat menyelesaikan masalah atau hambatan yang terjadi didalam Desa Lokori

Referensi

Sumber Jurnal dan Artikel

Arifin, A. (2021). Analisis Daya Saing Dalam Strategi Pengembangan Kompetensi Daerah : Studi Kasus Di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat . *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 29-38. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/394>

Arifin, A, dan Rupita, R. (2021). The Effect Of Environmental Factors To The Local Government Public Services At The Border Region. *Sosiohumaniora* 23, no. 3, 299–306.

- Amrullah, E. R., Ani Pullaila, Ismatul Hidayah, dan Aris Rusyiana. (2020). *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia*. Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 38 (2); hal 77-99
- Husna, C. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Bencana Di RSUDZA Banda Aceh*. Idea Nursing Journal, Vol. III (2), hal. 10–19
- Maarif, S. (2013). *Initiation of the Desa Tangguh Bencana Through Stimulus Response Method*. Indonesian Journal of Geography, Vol. 44 (2).
- Maarif, S. (2020). *Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana (Perspektif Sosiologis)*. Litera Cetakan Pertama 2020, hal 1-7
- Humas, Sekretariat Kabinet RI. (2020). *BLT Dana Desa Diberikan untuk April, Mei dan Juni*. Dipublikasikan pada 18 April 2020, diakses 30 Juni 2021 Sumber: <https://setkab.go.id/blt-dana-desa-diberikan-untuk-april-mei-dan-juni/>
- Ijudin, M. (2020). *Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial*. Pasundannews.COM, Edisi 8 April 2020.
- Oktari, R. S. (2019). *Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Indonesian Journal of Community Engagement, Vol. 4 (2), hal.189.
- Prakarsa Policy Brief. (2020). *Program Tunai di Era Covid-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta*, April 2020
- Purwanto, A. E. dan Dyah R. S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*
- Putera, R. E., dan Tengku Rika Valentina. (2011). *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*. MIMBAR. Vol. XXVII (2), Hal. 193-201
- Putri, Dian, Aditya, M. and Handziko, Rio, C. (2016). *Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Terhadap Dampak Perubahan Iklim Di Desa Jangkar Kabupaten Kulonprogo* Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim. Semarang: UMS, hal. 370–388.
- Pramanik, N. D. (2021). *Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol. 01 (12); hal 113120
- Wongkar, C. C. L., Said Aneke-R, Muhammad Hero Soepeno. 2021. *Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan*

Kakaskasen). *Lex Administratum*,
Vol. IX (4); hal. 38-47

Wowiling, R. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Politico*, vol. 10 (4); hal 1-12

Sumber Buku:

Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung. Pustaka Setia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Maarif, S. 2012. *Pikiran dan gagasan penanggulangan bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Mancini, J.A. & Bowen, G.L. 2009. *Community resilience: A social organization theory of action and change*. Pathways of Human Development: Exploration of change. p.245-265. Maryland: Lexington Books.

Twigg, J. 2012. *Karakteristik Masyarakat Tahan Bencana*.

Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR), AusAID.

Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan:

Peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa

Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona

Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

